

RENCANA KERJA

TAHUN 2023



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. HM Bahrun Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan
Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka BPBD Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja merupakan dokumen

rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman BPBD Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja BPBD tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp. 6.357.572.680,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.956.822.680,- dan belanja langsung Rp. 4.400.750.000,- . Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 7.528.853.478,- dengan belanja tidak langsung Rp. 2.376.805.077,- dan belanja langsung Rp. 5.152.048.401,- . Penyerapan anggaran belanja langsung BPBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.338.375.566,- (78,15%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.152.048.401,- . Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (100%), sedangkan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam menunjukan serapan terkecil yaitu 49,91%.

BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019 - 2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 2022				
					Renja SKPD Tahun Berjalan 2022				Pada Triwulan											
					1		2													
3	4	4A	5	\	7				8	9	12=8+9+10+11		13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100					
					K	Rp	K	Rp			DPA INDUK	DPA PERUBAHAN								
					K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
[TUJUAN]Mengurangi Risiko Bencana																				
[INDTUJUAN]	Indeks Resiko Bencana	Indeks	160		164.25		166		166		166		164		164		101.2			
[SASARAN]Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana																				
[INDSASARAN]	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,80		0,70		0,74		0,74		0,74		0,7		0,7		94.59			
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.143.966.716		5.143.966.716		5.143.966.716		785.427.264		1.085.126.660			
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100			
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100			
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		100		100		100		100		100		100			
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100			

[KEGIATAN]X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.347.425	50.347.425	50.347.425						0		
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	8		1	1		1	1		N/A		N/A		100	2	N/A
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	5		3	0		0	0		N/A		N/A			3	N/A
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.347.425	50.347.425	50.347.425						0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3		1	1		1	1		N/A		N/A		0	1	N/A
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.208.883.735	3.208.883.735	3.208.883.735								
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3		3	3		3	3		3		3		100	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.140.333.735	3.140.333.735	3.140.333.735								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	25		25	25		25	25		25		24		96	25	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							68.550.000	68.550.000	68.550.000								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	10		10	10		10	10		10		10		100	10	100
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							447.456.082	447.456.082	447.456.082								
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6	6		6	6		6		6		100	6	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							9.138.500	9.138.500	9.138.500								

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3		3	3		3		3		3		3		3		100		3		100		
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								81.905.500		81.905.500		81.905.500					22.600.000		22.600.000		27.59			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5		5	5		5		5		5		5		5		5		100		5		100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								15.497.957		15.497.957		15.497.957					1.227.600		1.227.600		7.92			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1		1	1		1		1		1		1		1		1		100		1		100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor								132.118.000		132.118.000		132.118.000					27.264.000		27.264.000		20.64			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36		12	12		12		12		12		3		3		6		50		18		50
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								25.860.900		25.860.900		25.860.900					9.195.750		9.195.750		35.56			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	4560		1508	1500		1500		1500		1500		N/A		N/A		N/A		0		1508		N/A
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	Ibr	130300		44300	0		4300		4300		4300		N/A		21000		21000		48.84		65300		50.12
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								182.935.225		182.935.225		182.935.225					30.728.116		30.728.116		16.8			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	65		23	20		20		20		20		3		6		9		45		32		49.23
[KEGIATAN]X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								260.484.500		260.484.500		260.484.500					99.022.550		99.022.550		38.01			
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3		3	3		3		3		3		3		3		3		100		3		100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel								83.621.500		83.621.500		83.621.500					82.922.550		82.922.550		99.16			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	152		52	50		50		50		50		N/A		52		52		104		104		68.42
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								158.672.000		158.672.000		158.672.000								0				

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	63		21	21	21	21	N/A	N/A	N/A	0	21	N/A
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	12		6	6	6	6	6	6	6	100	6	50
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							724.564.974	724.564.974	724.564.974	89.263.600	161.710.243	250.973.843	34.64	
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2		2	2	2	2	2	2	2	100	2	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							136.039.374	136.039.374	136.039.374		25.855.443	25.855.443	19.01	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36		12	12	12	12	3	3	6	50	18	50
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							588.525.600	588.525.600	588.525.600	89.263.600	135.854.800	225.118.400	38.25	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20		20	20	20	20	N/A	23	23	115	20	100
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							452.230.000	452.230.000	452.230.000		74.433.300	74.433.300	16.46	
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4		4	4	4	4	4	4	4	100	4	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							182.750.000	182.750.000	182.750.000		61.860.800	61.860.800	33.85	

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	23		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	23	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel						9.000.000		9.000.000		9.000.000						0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	60		20	20	20	20	20	N/A		20	20	20	100	40	66.67
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.810.000		61.810.000		61.810.000			11.543.500		11.543.500	18.68	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	162		54	54	54	54	54	N/A		20	20	20	37.04	74	45.68
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						198.670.000		198.670.000		198.670.000			1.029.000		1.029.000	0.52	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	100	3	100
[PROGRAM]PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.395.824.575		2.395.824.575		2.395.824.575			160.786.030		609.643.805	770.429.835	32.16
[INDPROGRAM]	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100		100	100		100		100			100		100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100		100	100		100		100			100		100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100		100	100		100		100			100		100	100	100
[KEGIATAN]Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						334.402.500		334.402.500		334.402.500			8.393.500		8.393.500	2.51	
[INDKEGIATAN]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	333000		113000	1100 00		1100 00		N/A			N/A		0	113000	N/A
[SUBKEGIATAN]Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						200.000.000		200.000.000		200.000.000					0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Kec	2		N/A	0		0					N/A		N/A		N/A
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	Dokumen	1		N/A	1		1		N/A			N/A		0		N/A

[SUBKEGIATAN]Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)								134.402.500	134.402.500	134.402.500			8.393.500	8.393.500	6.25			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah informasi yang disampaikan melalui media elektronik/cetak	informasi	2		N/A	1		1	1	1		N/A	N/A	N/A	0		N/A	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali	30		10	10		10	10	10		N/A	N/A	N/A	0	10	N/A	
[KEGIATAN]Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								310.037.250	310.037.250	310.037.250	3.045.530	13.508.100	16.553.630	5.34				
[INDKEGIATAN]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	600		150	200		200	200	200		N/A	N/A	N/A	0	150	N/A	
[SUBKEGIATAN]Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	1		N/A							N/A	N/A				N/A	
[SUBKEGIATAN]Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								87.664.750	87.664.750	87.664.750		1.420.000	1.420.000	1.62				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	9		3	3		3	3	3		N/A	N/A	N/A	0	3	N/A	
[SUBKEGIATAN]Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								222.372.500	222.372.500	222.372.500	3.045.530	12.088.100	15.133.630	6.81				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekondisi pasca bencana	Dokumen	3		1	1		1	1	1		N/A	N/A	N/A	0	1	N/A	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Paket	3		1	1		1	1	1		N/A	N/A	N/A	0	1	N/A	

[KEGIATAN]Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							1.690.826.700	1.690.826.700	1.690.826.700	157.740.500	563.426.380	721.166.880	42.65			
[INDKEGIATAN]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	3000			1000	1000	1000	1000	1251	1251	1251	125.1	1251	41.7	
[SUBKEGIATAN]Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						1.290.580.950	1.290.580.950	1.290.580.950	157.740.500	284.391.380	442.131.880	34.26				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	27	100		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibayarkan honornya	Orang	38	38	38	38	38	38	38	38	38	100	38	100		
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						400.245.750	400.245.750	400.245.750		279.035.000	279.035.000	69.72				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	2	100		
[KEGIATAN]Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						60.558.125	60.558.125	60.558.125		24.315.825	24.315.825	40.15				
[INDKEGIATAN]	Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	2	100		
[SUBKEGIATAN]Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang tersusun	regulasi	1		N/A					N/A	N/A				N/A	
[SUBKEGIATAN]Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dan	Keg	1		N/A					N/A	N/A				N/A	

	kemitraan dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan																		
[SUBKEGIATAN]	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Keg	1	1	1	1	60.558.125	1	60.558.125	1	60.558.125	1	24.315.825	1	24.315.825	1	40.15	1	100

Purwokerto, Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD

I

AS

BUI

M.Si.

NIP. 19780522 199703 1 003

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. merumuskan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- c. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelia pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
 - h. memantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - j. mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas BPBD;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundungan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Kasubag Keuangan;
 - 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

- 3) Sub Koordinator Perencanaan.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pencegahan;
 - 2) Sub Koordinator Kesiapsiagaan;
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Kedaruratan;
 - 2) Sub Koordinator Logistik;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Rehabilitasi;
 - 2) Sub Koordinator Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp. 7.539.541.291,- terurai dalam 2 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Risiko Bencana	175	164,25	-	106%	-
2.	Indeks Kapasitas Daerah	0,64	0,70	-	109%	-
3.	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	100%	100%	-	10%	-
4.	Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	100%	100%	-	100%	-
5.	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	-	100%	-

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
1.	Indeks Risiko Bencana	-	IKK	Indikator Tujuan	-	-	175	166	160	164,25	-	100	-
2.	Indeks Kapasitas Daerah	-	-	Indikator Sasaran	-	-	0,64	0,74	0,80	0,70	-	0	-
3.	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	-	-	Indikator Program	-	-	100%	100	100	100	-	100	-
4.	Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	-	-	Indikator Program	-	-	100%	100	100	100	-	100	-
5.	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	Indikator Program	-	-	100%	100	100	100	-	100	-

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyumas (yang termasuk nomor 3 se-Jawa Tengah dan nomor 113 se-Indonesia);
- b. Masih rendahnya Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banyumas.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada saat pra bencana, kejadian bencana maupun pascabencana.
2. SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 94 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, PHL dan juga TRC-PB. TRC-PB yang dijadikan 3 (tiga) menjadikan BPBD Kabupaten Banyumas sigap memberikan pelayanan yang prima 24 jam penuh kepada masyarakat Kabupaten Banyumas.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan bagi BPBD Kabupaten Banyumas pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pascabencana.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Banyumas juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Masih kurangnya sarana prasarana bagi BPBD Kabupaten Banyumas seperti komputer ataupun laptop untuk urusan dalam maupun seperti perahu, mobil *ambulance*, alat komunikasi dan prasarana lain yang akan sangat berguna pada saat terjadi bencana berskala besar;
2. Belum maksimalnya anggaran yang ada dikarenakan keterbatasan APBD. Menjadikan kinerja BPBD terutama pada Pra Bencana belum optimal dan belum semua dilaksanakan seperti pelatihan maupun rencana kontijensi.
3. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana dan masih rendahnya Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Banyumas;

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis

operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam penanggulangan bencana;
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang penanggulangan bencana;
3. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penanggulangan bencana;
4. Tidak menentunya cuaca/iklim menjadikan eksplorasi BPBD lebih luas dalam penanganan bencana;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Banyaknya Lembaga-Lembaga kemanusiaan yang bisa menjadi mitra kerja;

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana;
2. Perubahan peraturan perundangan;
3. Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 yang dimana tidak mencantumkan Kegiatan dalam ruang lingkup Pasca Bencana, sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
4. Kejadian Luar Biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional pelaksanaan penanggulangan bencana;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Menurunnya Indeks Risiko Bencana;
5. Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah;

Namun peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan bencana belum sepenuhnya memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Banyumas. Tingginya Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah yang masih rendah menjadi permasalahan nyata di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah 7 (tujuh) prioritas yang bisa menjadi solusi Indeks Kapasitas Daerah sehingga Indeks Risiko Bencana bisa menurun :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
4. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
5. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh BPBD Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
4. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
5. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2023 menunjukkan BPBD memiliki 2 program dan 10 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
TOTAL						7.475.579.578		8.195.000.000
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	7.475.579.578	160	8.195.000.000
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	7.475.579.578	0,8	8.195.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.078.806.200		1.445.000.000
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	258.806.200	100	240.000.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				68.806.200		75.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	68.806.200	110000	75.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				68.806.200		75.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	110000	68.806.200	110000	75.000.000 68.806.200
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				190.000.000		165.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	150	190.000.000	150	165.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						200.000.000
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000		150.000.000
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatian Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	75.000.000	100	150.000.000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana				15.000.000		15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	15.000.000	50	15.000.000
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	600.000.000	100	900.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				600.000.000		900.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1000	600.000.000	1100	900.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		450.000.000
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1000	300.000.000		450.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		450.000.000
			Jumlah Korban Benca yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	300.000.000	1000	450.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125	100	15.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				220.000.000		300.000.000
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	1	220.000.000	1	300.000.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				220.000.000		300.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	220.000.000	1	300.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.396.773.378		6.750.000.000
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	80.000.000	100	100.000.000
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		100.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	80.000.000	4	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		60.000.000
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	60.000.000	3	60.000.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.376.478.378	100	3.376.478.378
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.376.478.378		3.376.478.378
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	3.376.478.378	2	3.376.478.378
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.291.478.378		3.500.000.000
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	3.291.478.378	25	3.500.000.000
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				85.000.000		85.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	10	85.000.000	10	85.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	709.895.000	100	750.000.000
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				164.895.000		170.000.000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	164.895.000	3	170.000.000
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				29.964.500		30.000.000
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	29.964.500	50	30.000.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.930.500		120.000.000
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	114.930.500	21	120.000.000
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	20.000.000	6	20.000.000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				545.000.000		580.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	545.000.000	4	580.000.000
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				185.000.000		200.000.000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	185.000.000	23	200.000.000
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		70.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	65.000.000	54	70.000.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.000.000		300.000.000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	285.000.000	3	300.000.000
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.230.400.000	100	2.315.000.000
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				490.000.000		515.000.000
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	490.000.000	6	515.000.000
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000		10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		20.000.000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1	15.000.000	1	20.000.000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000		155.000.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Paket	1	155.000.000	1	155.000.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				155.000.000		155.000.000
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185.000.000		200.000.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konstultasi SKPD	Laporan	20	185.000.000	20	200.000.000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.740.400.000		1.800.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	1.740.400.000	2	1.800.000.000
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000		150.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	140.000.000	12	150.000.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.600.400.000		1.650.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.600.400.000	12	1.650.000.000

Purwokerto, 2022
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780522 199703 1 003

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2023 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada "**Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan penanggulangan bencana di Kab. Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana

pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. "**Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri**"

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 5: Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

BPBD mempunyai 2 program dan 10 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2023 yaitu Rp 7.475.579.578 dengan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
TOTAL						7.475.579.578		8.195.000.000
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	7.475.579.578	160	8.195.000.000
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	7.475.579.578	0,8	8.195.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.078.806.200		1.445.000.000
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	258.806.200	100	240.000.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				68.806.200		75.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	68.806.200	110000	75.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				68.806.200		75.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	110000	68.806.200	110000	75.000.000 68.806.200
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				190.000.000		165.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	150	190.000.000	150	165.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						200.000.000
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000		150.000.000
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatian Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	75.000.000	100	150.000.000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana				15.000.000		15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	15.000.000	50	15.000.000
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	600.000.000	100	900.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				600.000.000		900.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1000	600.000.000	1100	900.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		450.000.000
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1000	300.000.000		450.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		450.000.000
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	300.000.000	1000	450.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125	100	15.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				220.000.000		300.000.000
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	1	220.000.000	1	300.000.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				220.000.000		300.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	220.000.000	1	300.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.396.773.378		6.750.000.000
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	80.000.000	100	100.000.000
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		100.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	80.000.000	4	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		60.000.000
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	60.000.000	3	60.000.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.376.478.378	100	3.376.478.378
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.376.478.378		3.376.478.378
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	3.376.478.378	2	3.376.478.378
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.291.478.378		3.500.000.000
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	3.291.478.378	25	3.500.000.000
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				85.000.000		85.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	10	85.000.000	10	85.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	709.895.000	100	750.000.000
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				164.895.000		170.000.000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	164.895.000	3	170.000.000
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				29.964.500		30.000.000
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	29.964.500	50	30.000.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.930.500		120.000.000
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	114.930.500	21	120.000.000
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	20.000.000	6	20.000.000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				545.000.000		580.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	545.000.000	4	580.000.000
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				185.000.000		200.000.000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	185.000.000	23	200.000.000
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		70.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	65.000.000	54	70.000.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.000.000		300.000.000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	285.000.000	3	300.000.000
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.230.400.000	100	2.315.000.000
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				490.000.000		515.000.000
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	490.000.000	6	515.000.000
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000		10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		20.000.000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1	15.000.000	1	20.000.000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000		155.000.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Paket	1	155.000.000	1	155.000.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				155.000.000		155.000.000
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185.000.000		200.000.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konstultasi SKPD	Laporan	20	185.000.000	20	200.000.000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.740.400.000		1.800.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	1.740.400.000	2	1.800.000.000
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000		150.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	140.000.000	12	150.000.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.600.400.000		1.650.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.600.400.000	12	1.650.000.000

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780522 199703 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
TOTAL						7.475.579.578		
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	7.475.579.578		
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	7.475.579.578		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.078.806.200		
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	258.806.200		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				68.806.200		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	68.806.200		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				68.806.200		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	110000	68.806.200		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
			Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				190.000.000		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	150	190.000.000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000		
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000		
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	75.000.000		
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana				15.000.000		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	600.000.000		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				600.000.000		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1000	600.000.000		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1000	300.000.000		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	300.000.000		
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	1	220.000.000		
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				220.000.000		
			Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	220.000.000		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.396.773.378		
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	80.000.000		
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	80.000.000		
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000		
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	60.000.000		
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.376.478.378		
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.376.478.378		
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	3.376.478.378		
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.291.478.378		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	3.291.478.378		
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				85.000.000		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	10	85.000.000		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	709.895.000		

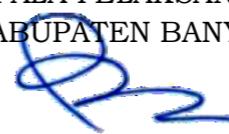
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				164.895.000		
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	164.895.000		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				29.964.500		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	29.964.500		
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.930.500		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	114.930.500		
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	20.000.000		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				545.000.000		
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	545.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				185.000.000		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	185.000.000		
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	65.000.000		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.000.000		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	285.000.000		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.230.400.000		
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				490.000.000		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	490.000.000		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Paket	1	10.000.000		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1	15.000.000		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Paket	1	155.000.000		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				155.000.000		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185.000.000		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konstultasi SKPD	Laporan	20	185.000.000		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.740.400.000		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	1.740.400.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2023		Catatan Penting	
					2023			
					Target	Rp.		
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	140.000.000		
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.600.400.000		
						1.600.400.000		

Purwokerto, 2022
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780522 199703 1 003

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) BPBD tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2023, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja BPBD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. BPBD dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja BPBD menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, 2022
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780522 199703 1 003